PERAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Oleh :

Fani Wulandari

2017/17060014

ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

PERAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

Nama : Fani Wulandari

TM/NIM : 2017/17060014

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Nomor	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Novya Zulva Riani, SE. M.Si	1.
2.	Anggota	Drs. Alianis, MS	2.
3.	Anggota	Ariusni, SE. M.Si	3.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASANKEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

Nama : Fani Wulandari

TM/NIM : 2017/17060014

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Mengetahui,	**Disetujui oleh:**
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi	**Pembimbing**
Melti Roza Adry, SE, ME	**Novya Zulva Riani, SE.M.Si**
NIP. 19830505 200604 2 001	**NIP.19711104 200501 2 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	Fani Wulandari
NIM/Tahun Masuk	:	17060014/2017
Tempat/ Tamggal Lahir	:	M. Labuh/ 13 Februari 1999
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi
Keahlian	:	Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas	:	Ekonomi
Alamat	:	Gajah II Arah Pantai
No HP/ Telepon	:	082285314720
Judul Skripsi	:	Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2021

Pernyataan

Fani Wulandari

NIM. 17060014

ABSTRAK

Fani Wulandari : Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat, di bawah bimbingan Ibu Novya Zulva Riani, SE. M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat (2) pengaruh anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat (3) pengaruh anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asositif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Sumatera Barat dalam bentuk data panel dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel yang diolah menggunakan Eviews9.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) alokasi dana desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sumatera Barat (2) anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sumatera Barat (3) anggaran kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Kemiskinan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat".

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Teristimewa orang tua tercinta Ayahanda (Kalius) dan Ibunda (Almarhumah Asniwati) yang selalu memberikan motivasi, perhatian, serta doa terbaik untuk anaknya.
2. Untuk kakak dan abang ku yang telah memberikan motivasi dan perhatian semua ini untuk kalian, apapun yang saya lakukan untuk membahagiakan kalian.
3. Ibu Novya Zulva Riani, SE. M. Si selaku pembimbing penulis yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran-saran yang sangat berharga serta penguji Bapak Drs. Alianis, MS dan Ibuk Ariusni, SE. M. Si.
4. Bapak Prof.Ganefri Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri SE. M.M selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmu selama menjalankan masa perkuliahan, beserta kakak administrasi Jurusan Ilmu Ekonomi.
8. Untuk teman-teman kuliah saya yang bernama Elfira Reflina, Lusy Tania, Annisa Febriyani dan Ghiana Desanti terima kasih banyak telah berjuang bersama-sama dalam perskripsian ini dan selalu membantu saya dalam keadaan sedih dan senang. Dan maafkan kami (fani, lusy, cabel & ghiana) yang selalu merepotkan fira dalam perskripsian ini. Terima Kasih banyak bestieee
9. Untuk teman-teman saya yang bernama Putri Melia, Dewi Dirgahayu, Rahmi Izzati, Nining Sundari, Noverma Liza dan Resti Larasati terima kasih telah mendengarkan kelukesah saya dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan perskripsian ini.

10. Untuk seluruh teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2017 yang telah berpartisipasi dalam memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

Padang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 14
BAB II **15**
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS **15**
A. Kajian Teori 15
1. Kemiskinan 15
2. Alokasi Anggaran Pemerintah 20
B. Penelitian Terdahulu 23
C. Kerangka Konseptual 28
D. Hipotesis 30
BAB III **31**
METODE PENELITIAN **31**
A. Jenis Penelitian 31
B. Tempat dan Waktu Penelitian 31
C. Jenis Data dan Sumber Data 31

D. Teknik Pengumpulan Data 32
E. Variabel Penelitian 32
F. Defenisi Operasional Variabel 32
G. Teknik Analisis Data 34
1. Analisis Deskriptif 34
2. Analisis Regresi Panel *(Pooled Analysis)* 34
BAB IV 41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 41
B. Deskripsi Variabel Penelitian 43
C. Analisi Induktif 53
D. Pembahasan Hasil Penelitian 62
BAB V 69
KESIMPULAN DAN SARAN 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota Sumatera Barat Tahun 2017-2019.....44

Tabel 2. Alokasi dana desa kabupaten/kota Sumatera Barat 2017-2019.....46

Tabel 3. Anggaran pendidikan kabupaten/kota Sumtera Barat 2017-2019 49

Tabel 4. Anggaran kesehatan kabupaten/kota Sumatera Barat 2017-2019.....51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Sumatera Barat 2

Grafik 1.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota Sumatera Barat..... 3

Grafik 1.3 Jumlah Alokasi Dana Desa di Sumatera Barat 5

Grafik 1.4 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sumatera Barat..... 7

Grafik 1.5 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Sumatera Barat 8

Grafik 1.6 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kabupaten Sumatera Barat 10

Grafik 1.7 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Sumatera Barat 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar Uji Chow 54

Gambar Uji Hausman 55

Gambar Uji Lagrage Multiplier 56

Gambar Uji Regresi Panel 58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi yang harus diberantas atau dikurangi oleh pemerintah secara lengkap, menjangkau seluruh sudut pandang kehidupan masyarakat dan dijalankan dengan tepat. Kemiskinan muncul saat individu maupun sekumpulan orang-orang tidak bisa memenuhi standar kesejahteraan kehidupan. Kemiskinan dipandang sebagai keadaan diri seorang atau sekelompok orang yang mengalami kekurangan (Zuber, 2011). Kemiskinan biasanya ditetapkan berdasarkan standar garis kemiskinan, menurut World Bank, (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai hilangnya kesejahteraan serta perihal kekurangan pendapatan minimum. Orang yang memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka dikategorikan masuk dalam kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan yang di sebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin masuk dalam ketegori kemiskinan relatif (Sartika et al., 2016).

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Sumatera Barat

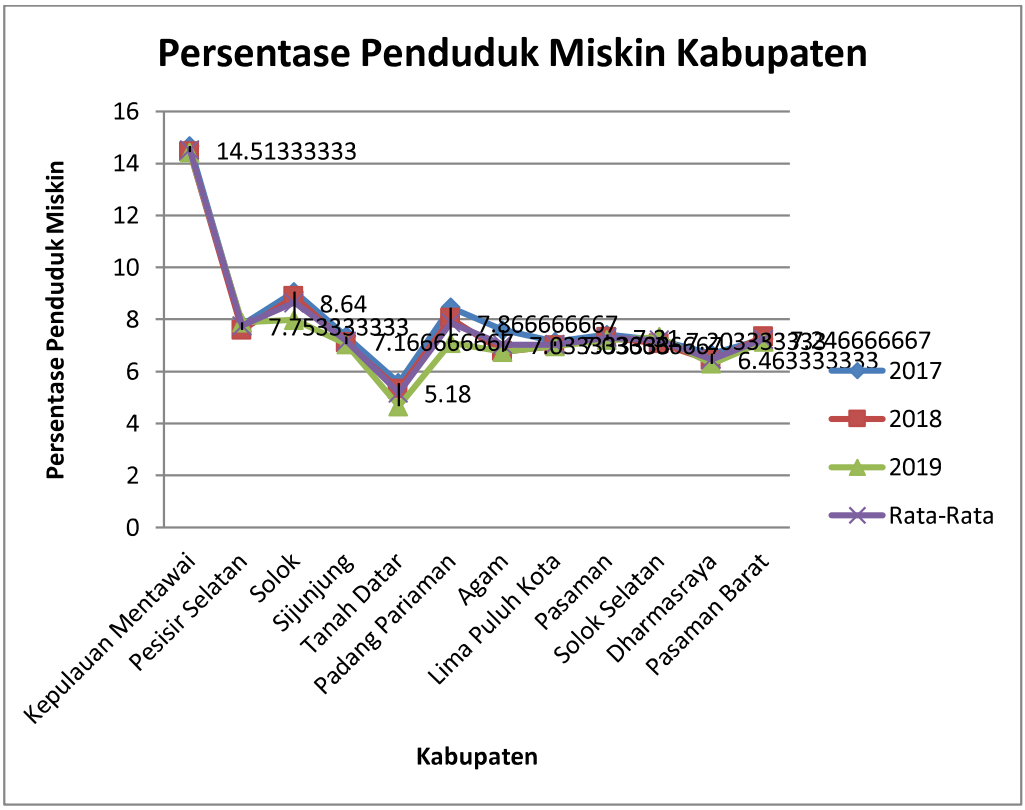

Sumber Data : BPS Sumatera Barat

Berdasarkan grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten di Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dari rata-rata persentase penduduk miskin yang tertinggi di kabupaten berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu rata-ratanya sebesar 14,51 persen, sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin terendah di kabupaten berada di Kabupaten Tanah Datar yaitu rata-ratanya sebesar 5,18 persen.

Grafik 1.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota Sumatera Barat

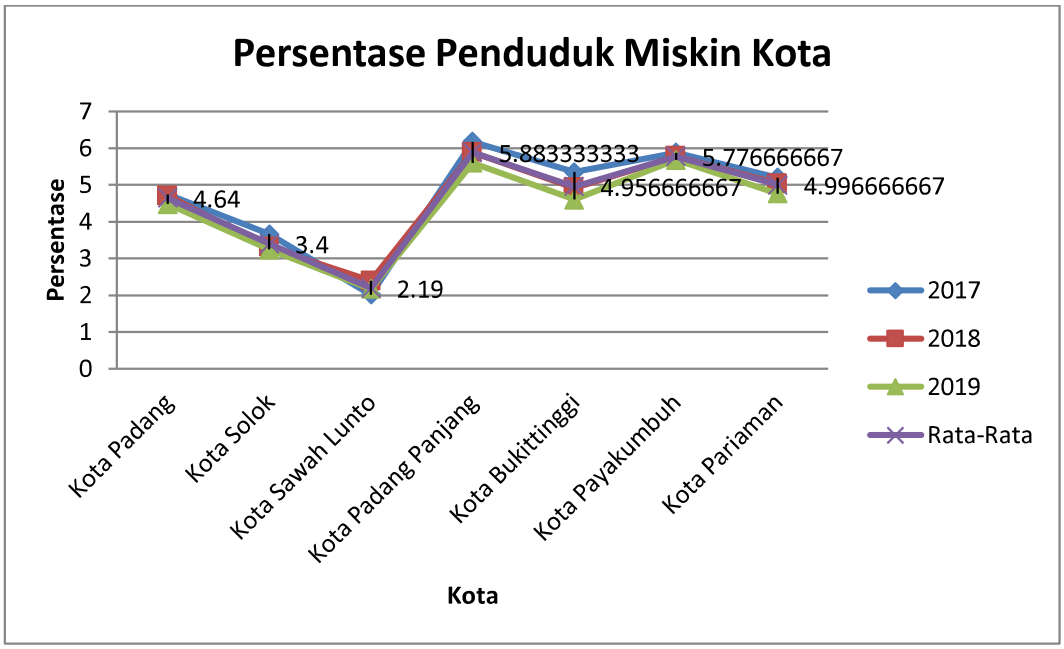

Sumber Data: BPS Sumatera Barat

Berdasarkan grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kota di Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dari rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi di kota berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 5,88 persen. Sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin terendah di kota berada di Kota Sawah Lunto yaitu sebesar 2,19 persen.

BPS, (2019) mencatat bahwa kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan, dimana penduduk miskin di perdesaan pada bulan maret 2019 sebanyak 7,88% turun menjadi 7,69% pada bulan september 2019, sedangkan penduduk miskin di perkotaan pada bulan maret 2019 sebanyak 4,76%

turun menjadi 4,71% pada bulan september 2019. Sehingga berbagai program pemerintah cenderung mengarahkan kepada pengurangan kemiskinan di pedesaan dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan diantaranya : program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, program keluarga harapan, subsidi beras untuk masyarakat miskin, bantuan siswa miskin, program askeskin/jamkesmas, program bantuan langsung tunai, dan program bantuan langsung sementara masyarakat, selain itu pemerintah juga memiliki program kebijakan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintahan kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk penanggulangi kemiskinan.

Grafik 1.3 Jumlah Alokasi Dana Desa di Sumatera Barat

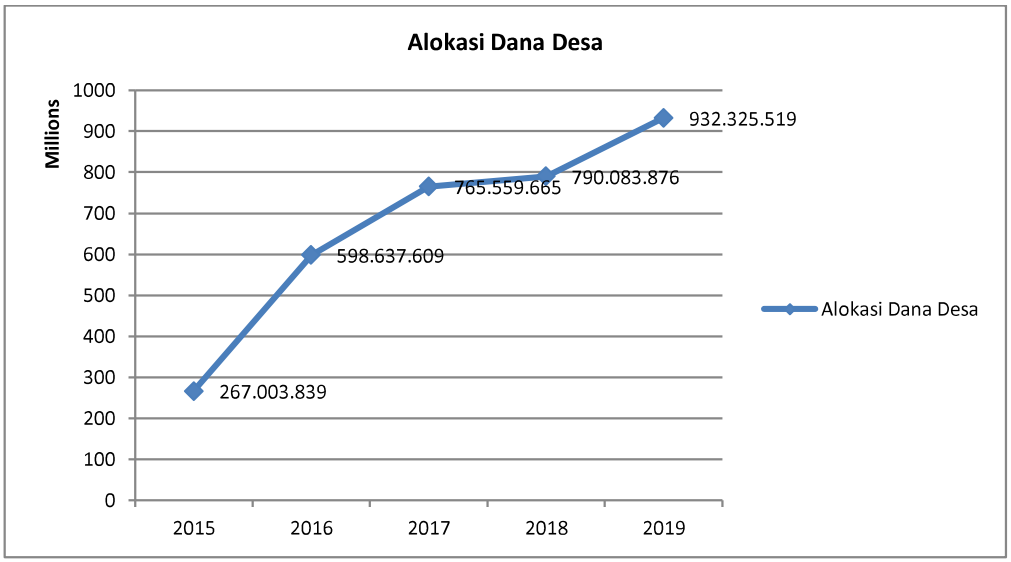

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Berdasarkan grafik 1.3 diatas terlihat bahwa ADD mengalami peningkatan pada tahun ke-tahun berikutnya. Pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar 267.003.839 dan pada tahun 2019 mencapai 932.325.519. Peningkatan ADD pada dasarnya meningkatkan pelaksanaan program alokasi dana desa yang dilaksanakan melalui biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, bantuan modal usaha POKMAS (peran kelompok masyarakat), bantuan operasional PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), bantuan operasional posyandu serta bantuan penyaluran beras miskin desa.

Menurut Ragnar Nurkse, (1953) menyatakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pengkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan. Serta dimana pendidikan memiliki dampak

terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah bisa mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah juga sehingga ketika kualitas sumber daya yang ada rendah maka akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Akibat menurunnya produktivitas bisa mempengaruhi upah yang rendah juga sehingga menyebabkan kemiskinan bertambah.

Menurut Sanz, et al (2017) dalam Bintang & Woyanti, (2018) mengemukakan bahwa kemiskinan sangat mungkin bisa dipengaruhi oleh pendidikan. Dengan adanya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menyebabkan terhalangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Hong & Pandey, (2017) mengemukakan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menjadi miskin, hal ini menjadi salah satu penentu dalam penurunan tingkat kemiskinan yaitu faktor pendidikan.

Pentingnya pendidikan dalam pengentasan kemiskinan memberikan dampak seperti semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka semakin sedikit jumlah penduduk miskin karena pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung upah yang lebih tinggi. Berikut tabel anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1.2

Grafik 1.4 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sumatera Barat.

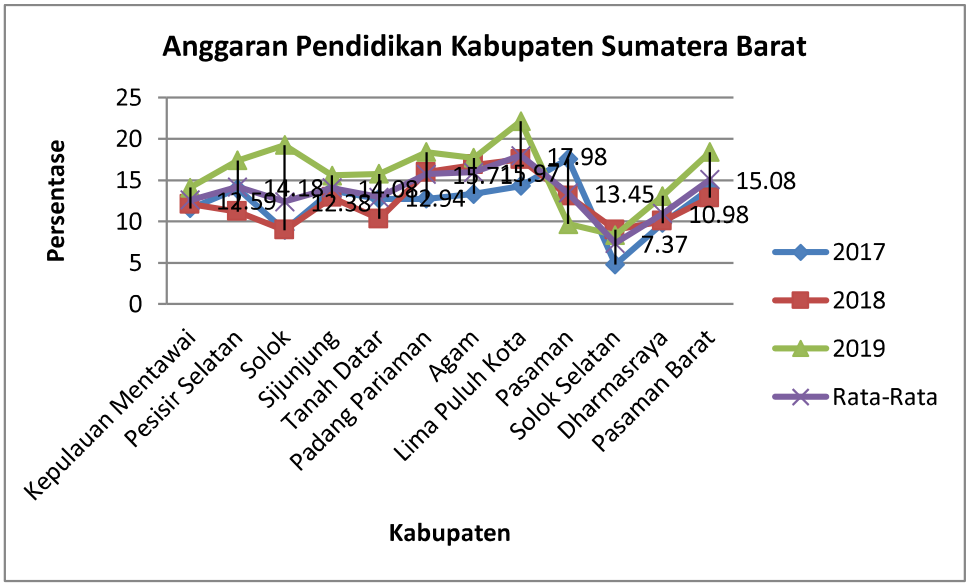

Sumber Data : Neraca Anggaran Pendidikan

Berdasarkan grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran pendidikan Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2017-2019 mengalami flutuasi. Dapat dilihat dimana rata-rata persentase anggaran pendidikan tertinggi di kabupaten berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu rata-ratanya sebesar 17,98 persen, sedangkan rata-rata persentase anggaran pendidikan terendah di kabupaten berada di Kabupaten Solok Selatan yaitu rata-ratanya sebesar 7,37 persen.

Grafik 1.5 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Sumatera Barat.

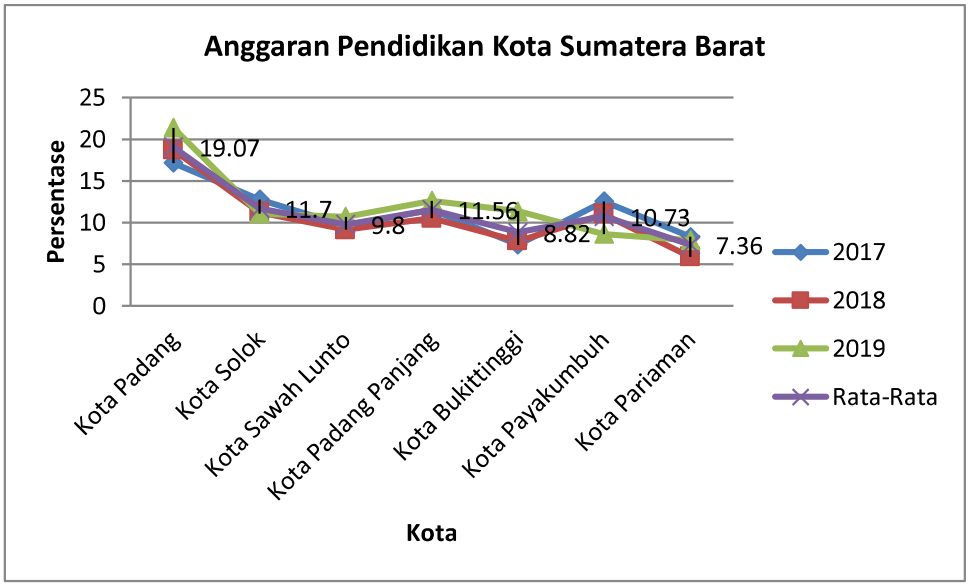

Sumber Data : Neraca Anggaran Pendidikan

Berdasarkan grafik 1.5 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran pendidikan Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dimana rata-rata persentase anggaran pendidikan tertinggi di kota berada di Kota Padang yaitu sebesar 19,07 persen. Sedangkan rata-rata persentase anggaran pendidikan terendah di kota berada di Kota Pariaman yaitu sebesar 7,36 persen.

Penyaluran alokasi dana pendidikan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 menetapkan minimal 20% dari belanja negara dan belanja daerah untuk anggaran pendidikan. Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan lagi kualitas

pendidikan di lingkungan masyarakat, serta melakukan pemerataan pendidikan agar semua kalangan masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang sama. Dengan hal ini dapat kita perhatikan pada grafik penduduk miskin kabupaten dan kota serta grafik anggaran pendidikan kabupaten dan kota terdapat tren anggaran pendidikan dibarengi dengan tren kemiskinan, dimana tren anggaran pendidikan di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sementara tren kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Maka dari itu tren anggaran pendidikan dengan tren kemiskinan saling berkaitan. Jika seseorang memiliki pendidikan yang lebih tinggi maka seseorang tersebut akan memilih pekerjaan yang lebih bagus dengan keterampilan yang dia punya dengan penghasilan pendapatan yang lebih tinggi yang akan dia terima maka angka kemiskinan bisa teratasi secara bertahap.

Selain pendidikan, kesehatan juga berkaitan dengan kemiskinan dimana kesehatan ialah suatu investasi dalam sumber daya manusia yang bisa mendorong masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sehingga kemiskinan bisa teratasi. Maka sebab itu kesehatan menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini bisa di lihat dari anggaran kesehatan yang di berikan pemerintah dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1.6 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kabupaten Sumatera Barat.

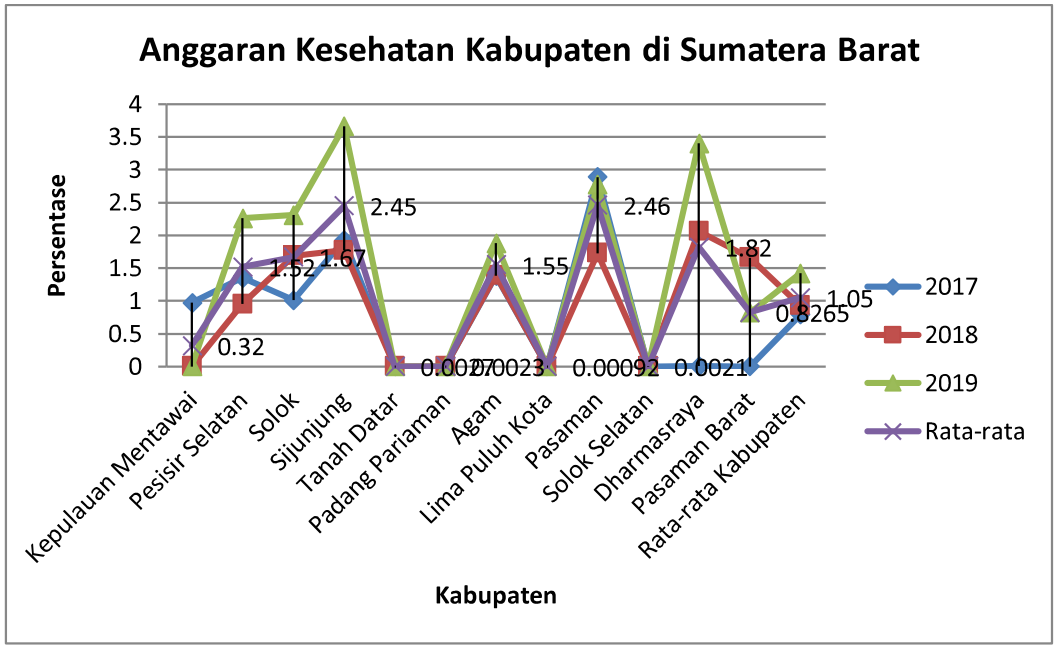

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.6 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran kesehatan kabupaten di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dimana rata-rata persentase anggaran kesehatan tertinggi di kabupaten berada di Kabupaten Pasaman yaitu rata-ratanya sebesar 2,46 persen, sedangkan rata-rata persentase anggaran kesehatan terendah di kabupaten berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu rata-ratanya sebesar 0,00092 persen.

Grafik 1.7 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Sumatera Barat.

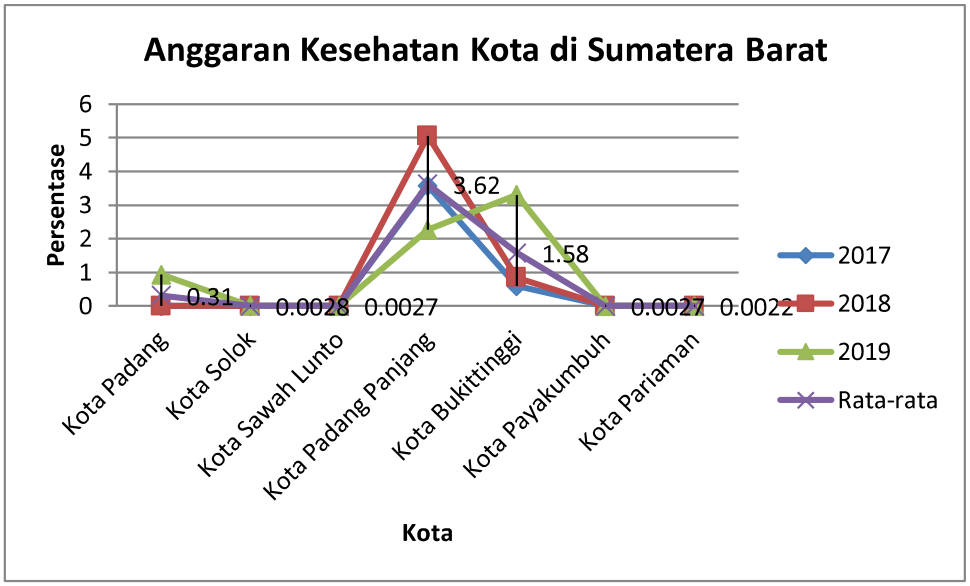

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.7 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran kesehatan kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dimana rata-rata persentase anggaran kesehatan tertinggi di kota berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 3,62 persen. Sedangkan rata-rata persentase anggaran kesehatan terendah di kota berada di Kota Pariaman yaitu sebesar 0,0022 persen.

Kesehatan merupakan modal dasar untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi, dengan seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik maka dapat

mengurangi kemiskinan dimana kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas kelompok miskin.

Alokasi dana desa juga mengalokasikan 10% dana desa untuk kesehatan dan pendidikan, dana yang dialokasikan untuk pendidikan digunakan kepada pembenahan sekolah PAUD di pedesaan, sedangkan untuk kesehatan alokasi dana desa digunakan untuk posyandu, berbeda dengan anggaran pendidikan yang dananya dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan bidikmisi atau KIP serta Program Indonesia Pintar (PIP), sedangkan anggaran kesehatan digunakan untuk memperbaiki pembangunan fasilitas kesehatan rumah sakit ataupun puskesmas. Bila seseorang mendapatkan kesehatan dan nutrisi yang lebih baik maka membuat usia masuk sekolah lebih dini dan absensi sekolah lebih sedikit serta pembelajaran lebih efektif, dengan demikian angka kemiskinan bisa berkurang secara bertahap. Hal ini terlihat bahwa alokasi dana desa, pendidikan dan kesehatan berkaitan erat dengan angka kemiskinan. Inilah yang menjadi hal menarik untuk pentingnya dilakukan analisis lebih lanjut dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan hasil mengenai bagaimana kemiskinan dapat diatasi dengan program alokasi dana desa, pendidikan dan kesehatan. Apakah memberikan dampak yang positif bagi kemiskinan yang menjadi sasaran dalam pengetasan kemiskinan pada masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai **"Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat".**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah diantaranya:

1. Sejauhmana pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh alokasi dana desa, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan berguna bagi :

1. Untuk pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam mengambil kebijakan publik.
2. Untuk pengembangan kebijakan pemerintah Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.
3. Bagi peneliti lebih lanjut yang meneliti tentang alokasi dana desa, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan kemiskinan.
4. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang.